

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI POLITIK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



Oleh :

**SYAWALDI MARSAL
NIM. 15058063**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI POLITIK**

Nama : Syawaldi Marsal

NIM/TM : 15058063/2015

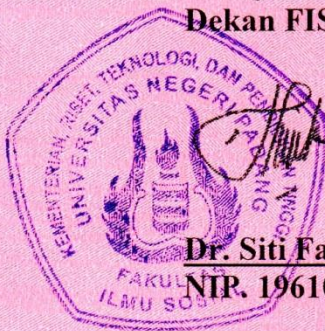
Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2019

**Mengetahui,
Dekan FIS UNP**



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

**Disetujui Oleh,
Pembimbing**

Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si
NIP. 19731202 200501 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

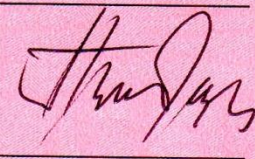
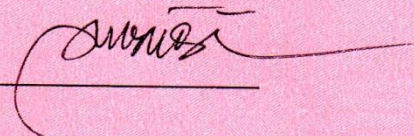
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2019

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI POLITIK

Nama : Syawaldi Marsal
NIM/TM : 15058063/2015
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si	1. 
2. Anggota : Drs. Ikhwan, M.Si	2. 
3. Anggota : Junaidi, S.Pd., M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syawaldi Marsal
NIM/TM : 15058063/2015
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu dalam Perspektif Sosiologi Politik**” adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2019

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**



Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Saya yang menyatakan,



Syawaldi Marsal
NIM. 15058063

ABSTRAK

Syawaldi Marsal. 2015. “Upaya Komisi Pemilihan (KPU) Kota Padang Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Dalam Perspektif Sosiologi Politik”. *Skripsi*. Mahasiswa Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan partisipasi pemilih yang ada di Kota Padang dalam beberapa proses pemilihan. Peningkatan partisipasi pemilih ini tidak lepas dari upaya KPU Kota Padang sebagai pelaksana terselenggaranya proses pemilihan yang terjadi di sekitar Kota Padang. Batasan rumusan masalah penelitian ini untuk melihat bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilihan umum dalam perspektif sosiologi politik. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik yang terjadi di Kota Padang.

Teori yang digunakan adalah teori aksi dari Talcott Parson. Dalam Teori ini aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Tetapi ditentukan oleh aktor untuk memilih, kemampuan ini disebut sebagai *volunterism*. *Volunterism* adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dan pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling* sebanyak 8 orang informan. Dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman (reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi pemilih yaitu (1) KPU sebagai Aktor Kolektif (2) Legal Drafting (3) Memperluas Jaringan

Kata Kunci: KPU Kota Padang, Pemilu, Partisipasi Pemilih.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, rasa syukur yang tiada terhingga atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan kekuatan lahir dan batin, petunjuk, berkah serta keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Dalam Perspektif Sosiologi Politik”*. Penulisan skripsi ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi Sosiologi- Antropologi, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universits Negeri Padang.

Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran serta membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada.

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan do'a moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta abang dan kakak yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan sampai skripsi ini selesai.

2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.
3. Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Jurusan Sosiologi dan Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ikhwan, M. Si selaku pembimbing akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan beserta Kakak dan Abang Staf Administrasi Jurusan Sosiologi.
6. Terimakasih kepada Dio Yoan Sabrina yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua informan yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.
8. Semua pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.

Teristimewa penulis ucapkan pada Ibunda, kakak dan abang tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a, semangat dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis demi penyelesaian Strata Satu (SI) ini, dan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan kepada semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bantuan bimbingan dan petunjuk yang

Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan dari kesempurnaan. Sebagaimana kata pepatah “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna”. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, guna kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas motivasi dan dukungannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penjelasan Konseptual	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Lokasi Penelitian.....	14
2. Pendekatan Dan Tipe Penelitian	14
3. Pemilihan Informan.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Triangulasi Data.....	20
6. Analisis Data	21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	26
A. Gambaran Umum Kota Padang.....	26
1. Sejarah Kota Padang	26
2. Visi Misi.....	29
3. Letak Geografis.....	30
4. Demografis.....	31

B. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	35
1. Visi Misi.....	35
2. Struktur Organisasi.....	36
3. Profil Komisioner.....	36
BAB III Upaya Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan	
Partisipasi Pemilih	42
A. Komisi Pemilihan Umum Sebagai Aktor Kolektif	42
B. Meningkatkan Sumber daya	44
C. Melaksanakan Program Terencana	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Analisa Data Menurut Miles Dan Huberman.....	25
2. Penduduk Penduduk menurut Kecamatan (ribu jiwa)	32
3. Struktur Organisasi KPU Kota Padang	36
4. Media Sosialisasi KPU Kota Padang	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Perbandingan jumlah partisipasi pemilih Kota Padang	4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Daftar Informan
4. Surat-Surat Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi di mana rakyat secara langsung memilih wakilnya untuk memimpin bangsa. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang lahir dari rakyat dan menurut kehendak rakyat yang dipraktekkan dalam bentuk perwakilan yang di dalamnya terdapat kompetisi politik yang dilaksanakan secara adil dan terbuka dalam pelaksanaannya.¹

Melalui Pemilihan Umum, rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD. Sistem ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum ini telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwasanya pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Pemilu pada umumnya dilaksanakan 5 tahun sekali baik untuk pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Calon Legislatif, dan pemilihan Presiden serta

¹ Dwi Haryono, A. Margono, S. (2016). Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. *EJournal Administrative Reform*, 4(2), 204–215.

Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun dalam proses pelaksanaan pemilu, seringkali tidak sesuai dengan harapan dan menimbulkan beberapa masalah. Tingginya sikap apatis masyarakat mengakibatkan terciptanya sebuah permasalahan yang disebut dengan golongan putih (golput)². Apatisme merupakan ketidakpedulian individu di mana individu tersebut tidak memiliki minat atau tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek partai politik³.

Menurut berita yang dikutip dari Detik News partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014 meleset dari yang ditargetkan KPU sebesar 75 persen. Tak hanya itu, partisipasi pemilih juga menurun dibandingkan dengan pemilu 2009 dan pemilu legislatif April 2014 lalu⁴. Sikap apatis ini melanda seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi rendah. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih juga masih rendah, hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi pemerintah yang masih belum maksimal. Partisipasi pemilih dalam pemilihan juga merupakan penentu arah kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi pemilih akan sangat ditentukan apakah masyarakat yang telah wajib memilih dapat memberikan suaeanya, apakah masyarakat diberikat akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah suaranya dapat memilih pemimimpin

² Yanuarti, S. (2009). Golput dan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 21–32.

³ Alem, M. G. Z. (2018). *FAKTOR PENYEBAB SIKAP APATISME MAHASISWA TERHADAP PARTAI POLITIK (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Budidaya Perairan Angkatan 2014 Universitas Lampung)*.

⁴ _____, "Partisipasi Pemilih di Pilpres 2014 Menurun, Ini Penjelasan KPU", (Detik News, 23 Juli 2014

yang berkualitas sesuai kepercayaannya didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih⁵.

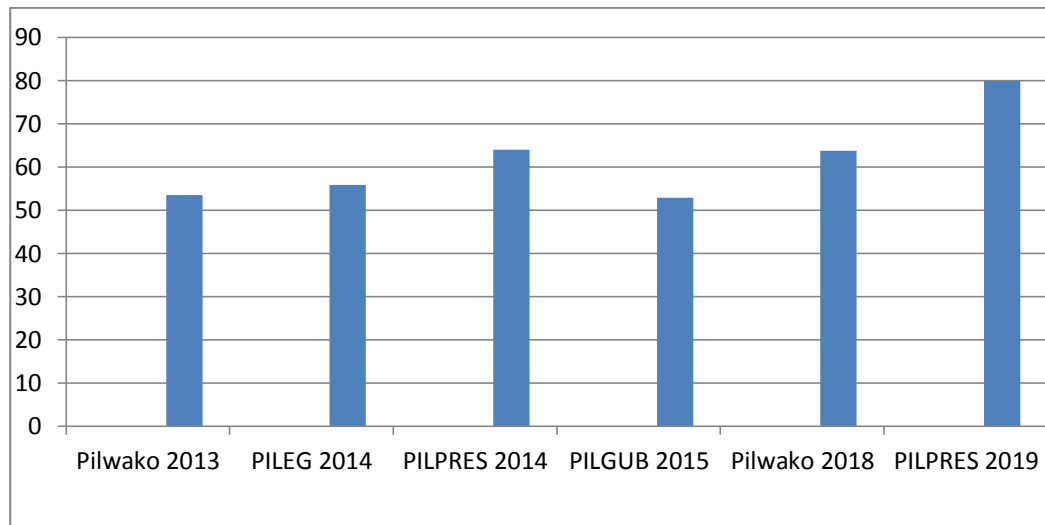
Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau disebut KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Calon Legislatif, dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Dalam kinerjanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam Undang-undang Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih adalah salah satu aspek dalam melihat tingkat keberhasilan pemilu di Indonesia. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu berdampak pada menurunnya kualitas sistem demokrasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah dan akan berdampak pada kehidupan politik bangsa.

Pemilihan Umum yang terjadi di Kota Padang pada rentang waktu 2013, 2014, 2015, 2018, dan terakhir pemilu serentak 2019. Pada pemilihan umum tersebut partisipasi pemilih cukup mengalami peningkatan bahkan Pemilu serentak yang terjadi pada tahun 2019 mencapai 80 %, ini sudah melebihi target nasional yang hanya menentukan partisipasi pemilih tinggi jika partisipasi mencapai 77%.

⁵ Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3, 14–28.

**Tab 1. Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang
Tahun 2013 dan 2018**



Sumber: Data Info Grafis KPU Padang 2019 dan Perbandingan Data Pemilu Sebelumnya

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang terjadi di Kota Padang. Pemilihan yang pertama yaitu tahun 2013 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang jumlah partisipasinya mencapai 53,58%, Selanjutnya PILEG 2014 jumlah partisipasi pemilih meningkat menjadi 55,83%, selanjutnya Pilpres 2014 jumlah partisipasi pemilih mengalami peningkatan kembali menjadi 64,03%, lalu pemilihan gubernur Sumatra Barat terjadi penurunan partisipasi pemilih di Kota Padang yakni menjadi 52,93%, pada tahun 2018 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tingkat partisipasi pemilih mengalami kenaikan kembali menjadi 63,76%, dan yang terakhir pemilu serentak yang terjadi pada tahun 2019 mengalami peningkatan partisipasi kembali sekitar 80%. Peningkatan partisipasi pemilih yang terjadi tidak lepas dari upaya dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Dalam peningkatan partisipasi pemilih ini,

KPU memiliki berbagai cara yang membuat hal ini sebagai dasar pemikiran peneliti untuk melakukan sebuah penelitian mengenai upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik.

Secara umum peningkatan partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa variabel. Adapun variabel tersebut meliputi (a). Variabel sosial-ekonomi (b). Variabel Politik (3). Variabel Kelembagaan. Dikutip dari Laporan Penelitian Partisipasi dalam Pemilu pada studi kasus “Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (*Voter Turn-Out*)” oleh Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si pada tahun 2015 bahwasanya faktor institusional atau kelembagaan hal yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Perubahan sistem dalam kenegaraan selalu dimulai dengan pergeseran dari sisi aturan formal. Aturan formal yang diterbitkan oleh negara sebagai pemegang otoritas dominan. Salah satu kekuatan dari otoritas yang dimiliki oleh negara adalah kemampuannya untuk memaksa. Maka variabel kelembagaan memiliki potensi untuk mengubah dari perilaku dari warganya.

Pada variabel kelembagaan, dapat dilihat KPU sebagai lembaga penyelenggara. Dalam peningkatan partisipasi pemilih ini, KPU memiliki berbagai cara dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Padang. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi pemilih seringkali menjadi parameter keberhasilan Pemilu, mengingat partisipasi pemilih berhubungan dengan legitimasi hasil pemilu dan berkaitan juga dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik,

penyelenggaraan pemilu dan para wakil rakyat⁶. Dalam meningkatkan partisipasi Pemilih, KPU Kota Padang Harus menyesuaikan dengan sumberdaya manusia yang ada di KPU Kota Padang itu sendiri, untuk mencapai target yang sesuai dengan harapannya KPU Kota Padang harus memiliki staff yang berkompeten untuk menjalankan program yang telah disusun.

Ada pun studi relevan yang terkait dengan penelitian ini adalah, *pertama*: Penelitian yang dilakukan oleh Muh Imam Adil Aqil yang berjudul “*Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2014*”. Hasil penelitiannya adalah Masyarakat Gowa telah berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli tahun 2014. Akan tetapi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 masih belum cukup efektif. Upaya-upaya yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yaitu (1). Mensosialisasikan ke masyarakat; (2). Penyebaran alat-alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/ motor/ rumah; (3). Sosialisasi media masa seperti radio dan surat kabar; (4). Program relawan demokrasi (relasi); (5). Sosialisasi Mobil keliling⁷. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini mengenai Peran KPU Kabupaten Gowa dalam meningkatkan

⁶ NUGROHO, A. (2019). *Strategi komisi pemilihan umum provinsi jambi dalam peningkatan partisipasi pemilih di kabupaten kerinci*.

⁷Muh Imam Adil Aqil, Skripsi: “*Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2015)

partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik.

Kedua ; Penelitian yang dilakukan oleh Nur Antika Agustin Putri yang berjudul “*Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dalam Mengurangi Angka Golput pada Pilkada 2015*”. Adapun hasil penelitiannya Upaya KPU Kabupaten Bantul untuk mengurangi angka golput pada Pilkada 2015 telah menggunakan beberapa metode yaitu: Metode tatap muka dan dialog secara menarik. Pemanfaatan aktifitas warga mempermudah pertemuan bersama pihak KPU dan masyarakat, penggunaan beberapa media cetak elektronik secara maksimal, serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilu. Metode-metode tersebut dilaksanakan berkerjasama dengan beberapa pihak, antara lain: PPK (Panitia Pelaksana Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Tokoh masyarakat, pemuka agama, Dosen UMY, dan Guru mata pelajaran PKN⁸.

Perbedaan penelitian Antika Agustin Putri dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini memusatkan penelitiannya pada angka golput dalam Pilkada 2015 Kabupaten Bantul. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik.

⁸ Nur Antika Agustin Putri, Skripsi: “*Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dalam mengurangi angka golput pada pilkada 2015*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini terfokus pada upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik. Ada pun partisipasi pemilih yang dilihat adalah pemilihan umum yang terjadi di Kota Padang dalam rentan waktu 2013 sampai dengan 2018. Dalam penelitian ini peneliti akan berusaha mencari tahu apa upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik?.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Padang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis, sebagai pengalaman awal dalam melakukan penelitian mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang

dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Padang 2018.

- b. Bagi Mahasiswa (Khususnya program studi Sosiologi Antropologi dan mahasiswa fakultas ilmu sosial umumnya), sebagai bahan rujukan mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2018.
- c. penelitian ini berguna sebagai pengembangan karya tulis ilmiah dan memperluas wawasan mengenai Komisi Pemilihan Umum di Kota Padang.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan mengenai upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik menggunakan teori aksi (*Action Theory*) oleh Talcott Parsons. Menurut Parson, aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu itu tidak dapat menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh aktor untuk memilih, kemampuan ini disebut sebagai *voluntarism*. *Voluntarism* adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya. Aktor yang dimaksudkan disini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang berperan sebagai penyelenggara proses pemilihan di

Kota Padang. Talcott Parson yang menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut⁹.

1. Adanya individu selaku aktor

Individu selaku aktor yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan umum yang bertugas meningkatkan partisipasi pemilih yang terjadi di Kota Padang.

2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan tujuan tertentu

Tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang adalah meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di setiap pemilu Kota Padang

3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya

Komisi Pemilihan Umum melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Padang Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan

Tindakan yang dilakukan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih terhalangi karena adanya tindakan masyarakat yang *apatistis*.

4. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

⁹ George Ritzer, “Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 48-49.

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum menggunakan azas pemilu menurut UU No. 23 tahun 2003. Dalam Undang-undang tersebut terdapat nilai-nilai yang harus ditaati oleh Komisi Pemilihan umum yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil.

F. Batasan Konsep

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/ DPD/ DPRD, Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, serta pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 masing-masing pada pasal 12, 13, dan 14.

KPU memiliki visi dan misi sebagai berikut¹⁰.

a. Visi

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

¹⁰ Kpu.go.id, Diakses pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23:31

- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
- 3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam visi dan misi KPU dapat dilihat bahwasanya terdapat misi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang berkaitan penelitian ini.

2. Partisipasi Pemilih

Moon dalam Efriza (2012: 535) menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih (*turn-out*) atau ketidakhadiran pemilih (*non-voting*) dalam suatu pemilu. Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih¹¹. *Pengertian lain dari voter turn-out*, adalah keterlibatan seseorang dalam Pemilu atau

¹¹ Eka Vidya Putra, “*Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out)*”, Laporan Penelitian Partisipasi dalam Pemilu, Revolt Institute, 2015, hlm. 13

pemberian suara. Pengertian ini tidak pada persoalan apakah seseorang memiliki hak pilih atau tidak. Tapi *jumlah pemilih* adalah keterlibatan dalam Pemilu, secara teknis dihitung dari jumlah suara dalam Pemilu kemudian dibagi dengan jumlah pemilih yang terdaftar. Tidak semua orang yang tercatat sebagai pemilih, menggunakan hak-nya. Jumlah pemilih dalam hal ini dilihat sebagai bentuk partisipasi politik dalam mengikuti Pemilu.

3. Sosiologi Politik

Sosiologi politik adalah suatu proses khususnya, proses keterkaitan antara masyarakat dan politik, hubungan antara struktur-struktur sosial dan hubungan tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa sosiologi politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan politik hukum dengan masyarakat, lembaga-lembaga politik disuatu sisi dan masyarakat dengan proses politik (sosialisasi, partisipasi, rekrutmen komunikasi dan konflik lain). Jadi artinya sosiologi politik adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang perilaku masyarakat dan politik baik itu dalam partisipasinya maupun sosialisasi politik itu sendiri.

4. Upaya

Upaya merupakan suatu usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usah, akal, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan masalah dan mencari jalan keluar. Upaya juga di artikan sebagai bagian yang dimainkan atau

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan¹². Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa upaya adalah suatu kegiatan seseorang untuk mencapai tujuannya.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Pemilihan lokasi tersebut karena merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam hal terselenggaranya setiap pemilihan yang terjadi di Kota Padang.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di kemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti nantinya akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif yang memberikan gambaran tentang upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik..

Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa

¹² Peter Salim dan yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:modern english pres, 2002). Hal 1187.

adanya intervensi apa pun dari peneliti¹³. Untuk mengerti masalah sosial tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif¹⁴. Sedangkan menurut Sukmadinata penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok¹⁵.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tipe penelitian deskriptif karena tipe penelitian ini akan memberikan “deskripsi yang padat” yang penting bagi penelitian mengenai upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU)

¹³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 8

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 8

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60

Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik.

3. Pemilihan Informan

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, maka teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), di mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam teknik *purposeful sampling*, peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti¹⁶. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *Purposive Sampling*, pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, atau karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh penulis.

Penentuan subjek penelitian bukan pada besarnya jumlah orang yang diperlukan untuk memberikan informasi (data), melainkan siapa saja diantara mereka yang paling banyak tahu atau memiliki informasi penting yang diperlukan dalam penelitian sehingga penelitian kualitatif cenderung menggunakan *purposive sampling*. Informan yang ingin peneliti wawancarai adalah Komisioner KPU Kota Padang, Kasubag bagian teknis pemilu dan dokumentasi, relawan demokrasi yang bekerja dengan KPU

¹⁶ Ibid, hlm. 106

Kota Padang, selanjutnya organisasi yang bekerja sama dengan KPU Kota Padang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatif

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan¹⁷. Observasi adalah kegiatan mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Observasi umumnya digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data atau untuk mencatat bukti¹⁸.

Berkaitan dengan observasi ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipasi yaitu observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat dan mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian¹⁹. Dalam penelitian ini peneliti merekam atau mencatat baik terstruktur atau semistruktur dalam lokasi penelitian untuk melihat bagaimana upaya Komisi

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 145

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 124

¹⁹ Jhon w. Creswell, *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar) hlm. 267

Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik.

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan di lapangan untuk melihat bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk dalam meningkatkan partisipasi pemilih Kepala Daerah Kota Padang 2018. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif, maksudnya peneliti ikut serta dalam bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Padang dalam Pemilihan Walikota Padang pada Tahun 2018 dalam persepektif sosiologi politik, secara langsung dan ikut aktif terlibat dalam proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Dalam melakukan observasi ini peneliti terkendala dalam berbagai hal, yakni ada beberapa dokumen yang ingin dicari peneliti tidak lengkap seperti struktur lembaga KPU Kota Padang yang terbaru.

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Secara sederhana dapat dikatakan wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung²⁰. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur

²⁰*Ibid*, hlm. 372

karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

Melalui wawancara mendalam, peneliti mengumpulkan data secara langsung tatap muka dengan informan sehingga dapat gambaran dan data mengenai bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik. Dari wawancara mendalam ini peneliti mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik. Dalam melakukan wawancara peneliti terhadap dengan jumlah narasumber yang ada di KPU Kota padang dikarenakan KPU Kota Padang masih menyelesaikan sengketa yang dibawa ke mahkamah konstitusi sehingga peneliti mengambil inisiatif memewawancarai lembaga dan orang yang bekerja sama dengan KPU Kota Padang.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya

monumental dari seseorang studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek²¹. Dokumentasi penelitian ini merupakan pencarian data primer dan sekunder serta pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik.

5. Triangulasi Data

Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi data merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel²². Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila data ke tiga teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi

²¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmi-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 143

²² A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 384

lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar. Data dianggap valid, jika dalam pengumpulan data sudah tidak ada lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru, dan proses pengumpulan data pun dianggap selesai. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Selain itu, dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data.

6. Analisis Data

Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan²³. Analisis data kualitatif ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 147

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”²⁴. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisa data yang mengacu pada model analisa interaktif (*interactive analytis*) oleh Miles dan Huberman. Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis. Dalam penelitian ini analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam penelitian proses analisis ini dilakukan melalui 4 tahap, berikut ini:

a. Pengumpulan Data

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang

²⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 339

dialaminya). Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai apa penemuan yang dijumpai. Selain itu merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi mengenai bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang direduksi. Sedangkan untuk data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian dibuang. Dengan begitu maka akan mempermudah peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti membuat rangkuman proses penelitian dalam mencari data mengenai bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik. Nantinya data tersebut yang akan direduksikan.

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, supaya peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi secara baik dan menyeluruh dan juga bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Maka dari itulah peneliti harus membuat naratif, grafik atau matrik untuk mempermudah penguasaan data atau informasi. Semua ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan²⁵. Dalam hal ini peneliti akan memahami jawaban dari informan, kemudian mengelompokkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan mengenai bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dilakukan guna mendapatkan kebenaran data yang jelas. Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengujian kebenaran setiap informasi yang muncul terhadap data yang dipilih dari lapangan. Apabila hasil kebenaran memperkuat kesimpulan atas data, maka pengumpulan data mengenai bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang meningkatkan partisipasi

²⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 209

pemilih padang penyelenggaraan pemilu dalam perspektif sosiologi politik.

Gambar 1: Analisa Data Model Interktif (*Interactif Model of Analysis*) Oleh Miles dan Huberman

